PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Septiana

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Tax revenue at Pratama Tax Service Office Garut registered in the Pratama Tax Service Office Garut DJP West Java I did not reach the target, even though the tax revenue in the Pratama Tax Service Office Garut increase. It is caused due to not focus on the examination of the tax in the amount of The Letter Of The Tax Provision Less Pay and tax payers wayward delivery Income Tax reported . This research aims to know the influence of the tax audit and tax penalties on tax revenue Pratama Tax Service Office Garut.

The methods used in this research is descriptive and verifikatif methods with quantitative approach. The population used in this research is the Pratama Tax Service Office Garut. The sample used is the number of and SPT *per month in the year 2011-2015 as much as 120 The Letter Of The Tax Provision Less Pay letters and number of tax payers wayward delivery in monthly. The statistical testused was multiple linear regression analysis.*

This hypothesis to the test results showed that (1) the Tax Audit has a significant positive influence Tax Revenue on in 2011-2015 (2) Tax Penalties have significant positive influence Tax Revenue on Pratama Tax Service Office Garut in 2011-2015.

Keywords : Tax Audit, Tax Penalties, Tax Revenue.

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi pembicaraan yang utama untuk menjembatani kesenjangan antara sisi pengeluaran dan sisi penerimaan Negara. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi : 2006).

Menurut pegawai pemeriksa pajak pada Kantor Pemeriksaan Pajak wilayah Garut mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu kesulitan mengetahui data wajib pajak karena pihak ketiga atau bank tidak memberi informasi kepada petugas pemeriksaan pajak (Rose : 2016). Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan sarana dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan pemerimaan pajak. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, Adapun fenomena pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Garut yaitu petugas pajak yang minim di kantor pelayanan pajak pratama Garut, dampaknya pemeriksaan pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menurun maka target penerimaan pajak menurun. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi dasar upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dalam menambah penerimaan kas Negara. Dalam tahun 2015 merupakan tahun wajib pajak yang akan berakhir sampai Desember. Sanksi perpajakan mulai dari sanksi administrasi seperti denda, bunga ataupun kenaikan. Khususnya pada sanksi admistrasi berupa denda untuk WP Badan terkena sanksi 1.000.000 bila tidak melaporkan SPT dan 500.000 untuk WP orang pribadi jika tidak melaporkan SPT. Adapun fenomena sanksi perpajakan yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam laporan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang akan dijatuhkan sanksi perpajakan berupa denda, dampaknya penerimaan pajak tidak melampaui target. Maka pendapatan modal negara akan berkurang, dan pembangunan infrastruktur juga tidak bisa maksimal. Banyak pengusaha yang tidak mau membayar pajak. Padahal, pajak ini kekuatan terbesar mengingat dari sektor migas tidak mencukupi (Wasiatur:2015).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Evalina Parannoan (2016). Penelitian ini betujuan untuk menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada dalam penelitian tersebut. Ada hal yang membedakan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah penulis menambahkan variabel dependen, yaitu variabel sanksi perpajakan. Didasari oleh permasalahan diatas inilah penulis ingin meniliti permasalahan ini sebagai penyusunan skripsi.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Dalam mengetahui data wajib pajak karena pihak ketiga atau bank tidak mudah memberi informasi kepada petugas pemeriksaan, berdampak pada penerimaan pajak tidak mencapai target.
2. Rendahnya tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang akan dijatuhkan sanksi perpajakan, berdampak penerimaan pajak tidak mencapai target.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Garut.

2. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Garut.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini untuk mengumpulkan data-data dan informasi berhubungan dengan Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Garut.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Garut.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Garut.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti
   Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perajakan Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Garut.
2. Bagi Instansi
   Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Garut.
3. Bagi Peneliti Lain
   Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Garut.

II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Burton (2001:57) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak (*Tax Audit*) merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa".

2.1.1.1 Indikator Pemeriksaan Pajak

Adapun indikator dari Pemeriksaan Pajak menurut definisi Soemarso (2007:60) adalah sebagai berikut :

Kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan pajak yang terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

2.1.2 Pengertian Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2006:39) menyatakan bahwa:

> "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/diapatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan".

2.1.2.1 Indikator Sanksi Perpajakan

Adapun indikator dari Sanksi Pajak Administrasi menurut definisi Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2007:60) adalah sebagai berikut :

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2.1.3 Pengertian Penerimaan Pajak

Pajak Pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002 : 23) dalam Standar Akuntansi Keuangan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

> "Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima".

Sesuai ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I, penerimaan dapat diukur yaitu dengan cara membandingkan Rencana atau target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak untuk mengetahui besarnya persentase penerimaan pajak dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Rencana Penerimaan}} \times 100\%$$

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang dijadikan sumber topik untuk penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Peneliti bisa mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian ynag dilakukan agar tujuan penelitian tercapai. Objek penelitian dalam penyusunan Metode Penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerimaan Pajak. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Garut.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan pada data-data numerik (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan masalah ke satu, dua dan tiga. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, dianalisis dan diproses lebih lajut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, jadi dari data tersebut akan ditarik kesimpulan.

3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Moh. Nazir (2003:84) adalah sebagai berikut: “Semua proses yang diperlakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Dalam pengertian yang lebih sempit desain penelitian ini penulis menetapkan desain penelitian dalam pengertian yang lebih luas, desain penelitiannya mencakup proses-proses sebagai berikut:

1. Penentuan tema, topik dan judul penelitian

   Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan tema penelitian. Tema bisa didapatkan dari fenomena yang sedang terjadi dan dapat diketahui melalui surat kabar, internet, forum ilmiah atau pun pengalaman pribadi. Setelah menetapkan tema, maka dilajutkan dengan penetapan topik penelitian yang berkaitan dengan garis pembahasan. Langkah selanjutnya adalah menetapkan judul untuk memperjelas ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian.
2. Menentukan identifikasi dan rumusan masalah

   Identifikasi masalah adalah pendeskripsian permasalahan – permasalahan apa saja yang sedang terjadi dalam perusahaan, terutama yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Sedangkan rumusan masalah merupakan pertanyaan – pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data.
3. Mencari konsep, teori, dan penelitian terdahulu yang relevan.

   Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara (berhipotesis), maka peneliti dapat mencari referensi teoritis yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Selain itu, penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian.
4. Pengujian Hipotesis

   Hipotesis merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang akan baru didasarkan kepada teori didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan belum ada pembuktian secara empiris.
5. Metode Penelitian

   Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dapat memilih metode penelitian yang sesuai. Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penarikan sampel dengan metode probability purposive sample. Sampel yang digunakan adalah laporan hasil pemeriksaan dari tahun 2011 – 2015.
6. Pengujian statistik

   Peneliti menggunakan analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yang akan dipakai untuk memutuskan apakah uji hipotesis dapat terbukti atau tidak kebenarannya. Penelitian ini menguji adanya Pengaruh Pemeriksaan Pajak dengan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.
7. Membuat kesimpulan dan saran.

   Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.

3.4 Operasional Variabel

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis teliti, yaitu Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak, maka terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu:

1. Variabel Independen
   Variabel independen atau variabel bebas adalah suatu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, bahkan variabel independen merupakan faktor penyebab yang akan mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini, variabel independen (X) adalah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan.
2. Variabel Dependen
   Variabel dependen atau variabel tergantung adalah suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainya. Dalam hal ini, variabel dependen adalah penerimaan pajak.

3.5. Penarikan Sampel dan Populasi

1. Populasi

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Berdasarkan pengertian di atas, maka populasi yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu KPP Pratama Garut yang terdaftar pada Kanwil DJP Jawa Barat I.

2. Sampel

Untuk menentukan sampel yang akan diteliti terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. Untuk teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan oleh penulis yang sesuai dengan judul yang diteliti adalah probability sampling.

3.6 Metode Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokoerlasi.

Adapun masing-masing pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005:111).

1) Uji Kolmogrov Smirnov Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

a) Jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal

b) Jika nilai signifikan < 0.05

maka distribusi tidak normal Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

Ho: Data residual berdistribusi normal

Ha: Data residual tidak berdistribusi normal

2) Histogram Pengujian dengan model histogram memiliki ketentuan bahwa data normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Jika data melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri berarti data tidak terdistribusi secara normal.

3) Grafik Normality Probability Plot Dalam uji ini, ketentuan yang digunakan adalah:

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel -variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini disebut variabel-variabel bebas ini tidak ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi diantara sesamanya sama dengan nol. Jika terjadi korelasi sempurna diantara sesama variabel bebas, maka konsekuensinya adalah:

- Koefisien - koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir,
- Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga.

c) Uji Heteroskedastisitas Menurut Imam Ghozali (2005:105), uji heteroskedastisitas bertujuan mengujiapakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

d) Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2005:95). Untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi maka dapat dideteksi dengan uji Durbin-Waston (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1) angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif,

2) angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi,

3) angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

2. Analisis Regresi Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

3.7 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian secara parsial Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak

Hipotesis parsial antara variabel bebas Pemeriksaan Pajak terhadap variabel Penerimaan Pajak.

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak.

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Dengan asumsi apabila –t tabel ≤ t hitung ≤t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak dan t hitung > t tabel atau –t hitung < -t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=60-2-1=57, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar ± 2,00247 Ha diterima. Dengan kata lain dapat ditunjukan nilai t hitung(4,138) > t_{tabel} (2.00247). Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pemeriksaan Pajak (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y) secara parsial.

2. Pengujian secara parsial Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak

Hipotesis parsial antara variabel bebas Sanksi Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=60-2-1=57, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar ± 2.00247 Ho ditolak. Dengan kata lain dapat ditunjukan nilai t_{hitung} (2,147) > $-t_{tabel}$ (-2.00247) dan t_{tabel}(2.00247). Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Sanksi Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak (Y) secara parsial dengan ditunjukan nilai t_{hitung} (2,147).

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Analisis Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut

Perkembangan rata-rata Data SKPKB Seksi Pemeriksaan terjadi pada tahun 2015 dengan rata-rata perkembangan 10,75 persentasenya sebesar 5.18%, pada gambar grafik 4.1 terlihat terjadi fluktuasi, hal tersebut menurun dikarenakan kurangnya informasi dari pihak ketiga. Sedangkan terjadi kenaikan dikarenakan penerapan sistem *reward and punishment* dan juga teknologi yang digunakan para pemeriksa pajak mendukung dalam mengerjakan tugas pemeriksaan.

4.1.2. Analisis Sanksi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut

Pada gambar 4.2 perkembangan jumlah SPT pada KPP Pratama Garut terjadi peningkatan pada tahun 2014 dengan rata-rata 5319 dan persentase sebesar 13.57%. Sedangkan rata-rata terendah pada tahun 2012 sebesar 1304,75 dan persentasenya 0,014%. Dari tahun ke-tahun SPT mengalami kenaikan, hal tersebut dikarenakan banyak wajib pajak yang telah mengerti dengan kewajiban peloprannya, dan juga banyak penyuluhan dari KPP tentang kewajiban pelaporan. Sarana prasarana juga hal utama untuk menunjang wajib pajak untuk melakukan kewajibannya seperti *e-spt* dan *e-billing,* wajib pajak yang meningkat harus diseimbangi dengan sarana yang baik yang dipersiapkan oleh KPP Pratama Garut.

4.1.3. Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut

Dari grafik perkembangan jumlah penerimaan pajak memiliki perkembangan tertinggi pada tahun 2015 dengan rata-rata Rp. 19.198.074.339,00 dan persentase sebesar 4.18%. Sedangkan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2014 dengan rata-rata Rp. 13.540.638.439,00 dan persentasenya sebesar 0.02%. Penerimaan pada KPP Pratama Garut mengalami fluktuasi, hal tersebut terjadi karena wajib pajak yang bertambah dan kurangnya petugas pemeriksa pajak.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pemikiran, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Garut, maka pada bagian akhir dari penelitian akan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y) pada KPP Pratama Bandung Garut periode 2011-2015. Hal ini terjadi karena Ho pada uji hipotesis ditolak dan Ha diterima, dimana pemeriksaan pajak kurang fokus dalam memeriksa jumlah data SKPKB. Artinya terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y).
2. Bahwa terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Penerimaan Pajak (Y) pada KPP Pratama Garut periode 2011-2015. Hal ini terjadi karena Ho pada uji hipotesis ditolak dan Ha diterima, dimana rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pelaporan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang akan dijatuhkan sanksi perpajakan berupa denda. Artinya terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Penerimaan Pajak (Y).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan pajak pada KPP Pratama Garut, maka diberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Jika dilihat dari salah satu kegiatan pemeriksaan pajak dalam bentuk SKPKB yaitu dalam hal melakukan konfirmasi pada pihak ketiga harus lebih ditingkatkan dan sehingga masalah seperti sulitnya mengetahui data wajib pajak dari pihak ketiga/bank tidak terjadi lagi. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan pajak akan berjalan lebih baik lagi dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Garut mencapai target penerimaannya.
2. Untuk Sanksi Perajakan harus diberikan sanksi yang tegas, agar wajib pajak patuh dalam kewajiban pelaporan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pelaporan harus diberikan penyuluhan dari pihak KPP Pratama Garut. Sehingga wajib pajak tidak terkena sanksi perpajakannya patuh dalam kewajiban pelaporannya untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan, agar dapat membantu penerimaan pajak Negara.

5.2.2 Saran Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.